

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam memahami pengertian judul proposal ini, yaitu “*Upaya Rumah Zakat Indonesia Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul*”, maka penulis memberi batasan dan pengertian arti kata judul di atas, sehingga dalam pengertiannya dapat dipahami dengan benar.

##### 1. Upaya

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencari suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar<sup>1</sup>.

##### 2. Rumah Zakat Indonesia Dompet Sosial Ummul Quro (RZI DSUQ)

Rumah Zakat Indonesia DSUQ adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Agama RI. No.157 Tahun 2003. Lembaga ini bergerak dalam layanan - layanan program di bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan.

Jadi RZI DSUQ ini adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang mengumpulkan dan mendayagunakan sumber dana dari zakat, infak, dan sodaqoh secara amanah, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### 3. Mengentaskan Kemiskinan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 995.

Mengentaskan adalah mengangkat dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan kemiskinan berarti miskin. Miskin adalah tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan mengentaskan kemiskinan adalah mengangkat taraf hidup warga masyarakat Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul dari kondisi yang kurang makmur menuju masyarakat yang makmur.

#### 4. Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul

Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul adalah sebuah dusun yang menjadi salah satu desa binaan RZI DSUQ DIY. Lembaga ini lebih memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian modal usaha atau dana produktif.

Berdasarkan penegasan judul di atas, yaitu ***“Upaya Rumah Zakat Indonesia Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul”*** adalah usaha atau ikhtiar yang dilaksanakan oleh RZI DSUQ DIY (lembaga sosial kemasyarakatan) berupa mengumpulkan dan mendayagunakan sumber dana dari zakat, infak, dan sodaqoh secara amanah, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk RZI DSUQ DIY dalam Mengentaskan Kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan modal usaha atau dana produktif.

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibid.*, hlm. 587

## B. LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.<sup>3</sup> Kebutuhan dasar manusia itu adalah pangan, sandang, perumahan, dan selain itu manusia juga membutuhkan akan kesehatan dan pendidikan yang mendukung perkembangan Sumber Daya Manusia atau SDM mereka. Kemiskinan akan mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya perbuatan yang dilarang agama. Akibatnya timbul kekacauan yaitu adanya penipuan, pencurian, dan sebagainya. Berikut langkah untuk menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan<sup>4</sup> adalah sebagai berikut:

1. Bekerja dengan giat
2. Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat
3. Kewajiban membayar zakat
4. Ada jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.

Berdirinya sebuah Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam hal kegiatan yang mengarah kepada kebersamaan. Semangat hidup yang diwarnai dengan gotong royong dan tolong-menolong menjadi modal penting dalam mewujudkan kebersamaan tersebut. Masyarakat yang mayoritas Islam ini, ternyata tidak sedikit-banyak yang memberikan perhatiannya kepada anggota masyarakat (terutama masyarakat miskin). Di dalam ajaran agama telah dijelaskan bahwa, “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

---

<sup>3</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 27

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 131

kebajikan dan taqwa". Ajaran tersebut menjadi kunci utama sebuah Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Gerakan pengentasan kemiskinan adalah gerakan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>5</sup> Manusia selalu menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Langkah untuk mempertahankan hidupnya yaitu dengan terpenuhinya kesejahteraan baik lahir, batin, material maupun spiritual. Pedoman utama dalam merumuskan kebijaksanaan pengentasan kemiskinan, adalah mendukung dan menunjang berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran serta, produktivitas dan efisiensi.<sup>6</sup>

Salah satu langkah dalam mengembangkan masyarakat diperlukan adanya pelaksana yang berperan secara terpisah dan saling berkaitan. Mereka adalah pihak motivator, fasilitator, penyanggah dana, dan pelaku gerakan.<sup>7</sup> Motivator, fasilitator, dan penyanggah dana adalah pihak luar yang mempunyai peran penting yaitu dalam hal mendorong, yang merencanakan, dan membiayai. Sedangkan, pelaku gerakan adalah kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan pengembangan masyarakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai kewajiban dan mengandung unsur sosial, sedangkan bentuk lainnya yaitu infak, sodaqoh, dan wakaf.

---

<sup>5</sup> Sulisaningsih, *Dinamika Kelompok keagamaan sebagai pendorong Usaha Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi keluarga* dalam jurnal penelitian No.17 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997) hlm. 23

<sup>6</sup> Gunawan Suryodingrat, *Membangun Perkonomian Rakyat*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 37

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 24

Dakwah Islam yang dikembangkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf akan memperoleh keuntungan, antara lain: mendapatkan dana untuk kemajuan umat Islam, dapat menghilangkan kesenjangan antara fakir miskin dengan orang-orang kaya, dapat memperbaiki pergaulan hidup yang mempunyai sifat tolong menolong.

Hal ini menunjukkan ketundukan, ketaatan, dan kecintaan dari seorang hamba kepada Allah SWT serta sebagai wujud syukur atas nikmat-Nya (*hablun minallah*). Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf untuk kemaslahatan umat dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaannya sebagai pendukung dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan aman, serta sejahtera baik lahir maupun batin (*hablun minannaas*).

Berdirinya RZI DSUQ DIY ini, berupaya mengelola zakat secara amanah, profesioanal, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi cita-cita sesuai amanah, maka RZI DSUQ DIY terus mengembangkan layanan-layanan baru dalam bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Lembaga Amil Zakat Nasional dan secara resmi telah menjadi Rumah Zakat Indonesia tetap konsisten pada produk dan program layanan kepada masyarakat.

**Visi:**

Menjadi lembaga amil zakat yang unggul dan terpercaya

**Misi:**

- ❖ Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif
- ❖ Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani

Pemberdayaan ekonomi umat oleh RZI DSUQ DIY memiliki dua program, yaitu program yang sifatnya konsumtif dan program yang sifatnya produktif. Adapun program yang sifatnya produktif adalah berupa pinjaman modal usaha bagi pedagang dan pengusaha kecil untuk masyarakat miskin yang mempunyai kemauan berusaha (berpotensi).

Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul adalah desa binaan RZI DSUQ DIY yang memiliki usaha kerajinan peci rajut bagi ibu-ibu rumah tangga. Berdasarkan pengamatan sepintas, pemberian pinjaman modal usaha tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya terutama dalam meningkatkan ekonomi mereka, yang semula banyak ibu-ibu rumah tangga yang menganggur. Berkat program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh RZI DSUQ DIY, kini ibu-ibu rumah tangga tumbuh semangat jiwa yang kreatif dan inovatif dalam meningkatkan ekonomi keluarganya.

Adanya aktivitas RZI DSUQ DIY dalam pemberdayaan ekonomi umat (pinjaman modal usaha) tersebut yang diberikan ibu-ibu rumah tangga pengusaha peci rajut di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul dalam rangka

mengentaskan mereka dari kemiskinan dan menjual keberhasilannya, dan hal inilah yang menjadikan penyusun merasa tertarik.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana RZI DSUQ DIY dalam mengumpulkan dana umat?
2. Bagaimana RZI DSUQ DIY dalam mendayagunakan dana umat?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap RZI DSUQ DIY dalam mengentaskan kemiskinan di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana RZI DSUQ DIY dalam mengumpulkan dana umat.
2. Untuk mengetahui bagaimana RZI DSUQ DIY dalam mendayagunakan dana umat.
3. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap RZI DSUQ DIY dalam mengentaskan kemiskinan di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Secara Teoritik adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan tentang pengelolaan, pendayagunaan, dan pemanfaatan zakat, infak, dan sodaqoh, dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi penelitian yang sama.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka dalam hal meningkatkan ekonomi melalui LAZ.

Manfaat Secara Praktis adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan ekonominya melalui pendayagunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat, infak, dan sodaqoh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan umat Islam umumnya dalam hal meningkatkan ukhuwah Islamiyah.

## **F. KERANGKA TEORITIK**

### **1. Zakat**

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi adalah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan



diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>8</sup>

Menunaikan zakat sebagai bagian dari sifat *mu'minin* (orang-orang yang beriman), *muhsinin* (berbuat baik), *abrar* (luhur) dan *muttaqun* (taqwa). Zakat merupakan tanda iman dan bukti keikhlasan yang menjadi penengah antara Islam dan kafir, antara iman dan kemunafikan, antara taqwa dan kejahatan.<sup>9</sup>

Zakat sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan nasional khususnya dalam hal mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup> Zakat yang dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan masyarakat menjadi bermakna dan berdayaguna, karena pemerataan ekonomi yang sama rata dan tidak ada perbedaan status ekonomi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu, zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dibulan Ramadhan menjelang shalat 'Ied (hari raya).<sup>12</sup> Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah Pertama, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kecaman - kecaman yang mengotorkan puasanya. Dua,

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, penerjemah: A Maimun Syamsudin dan A Wahid Hasan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 141

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997) hlm. 118

<sup>11</sup> Qs. *At- Taubah* (9): 60

<sup>12</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, penerjemah: Dewi Nurjulianti (Jakarta: Yatasan Swarna Bhumi, 1995) hlm. 88-96

untuk menyempurnakan puasanya. Tiga, untuk menyempurnakan kerayaan hari raya.<sup>13</sup>

Zakat fitrah diwajibkan setiap muslim dan muslimat, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan yang memiliki kelebihan makanan pokok yaitu beras seberat 2,5 kg dari makanannya untuk keluarganya atau dengan uang yang seharga dengannya. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal tersebut meliputi: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang dagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan.<sup>14</sup>

Zakat merupakan salah satu dari lima pilar tegaknya bangunan Islam, sebab didalamnya terdapat beberapa aspek. Pertama, menunaikan zakat termasuk pekerjaan yang dapat menolong orang lemah dan menderita. Kedua, zakat dapat menyucikan jiwa dari dosa dan membersihkan akhlak dengan kedermawaan, kemurahan hati dan menjauhi sifat kikir dan serakah. Ketiga, Allah SWT telah memberikan karunia kepada orang-orang kaya serta memuliakannya, sebab memberikan zakat kepada fakir, miskin sebagai wujud rasa syukur terhadap kenikmatan yang menjadi wajib.<sup>15</sup>

Selain itu, zakat juga merupakan ajaran yang mulia ialah sebagai salah satu instrumen pemerataan kekayaan. Hal ini seiring dengan konsep Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin*, terutama dalam penanganan kemiskinan.

---

<sup>13</sup> Tolchah Mansur, *Ilmu Fiqh* (Jakarta :Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam,1998) hlm,229

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Al – Ma’arif,1978) hlm,29

<sup>15</sup> Hasbi As Shidieqy, *Al Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1977) hlm,105

Zakat merupakan peperangan praktis terhadap setiap harta yang di timbun, karena setiap tahunnya harus dikeluarkan 2,5 %. Di sisi lain, Islam memberikan kesempatan yang adil bagi kaum fakir untuk berdiri sejajar dengan orang-orang kaya. Dari aspek psikologis dan yuridis, orang kaya tidak memiliki keistimewaan apa-apa atas orang fakir. Akan tetapi, di hadapan hukum Allah adalah sama seperti gerigi sisir. Dalam penyebaran kekayaan Islam menggunakan cara-cara yang produktif.

Dengan demikian, prinsip keadilan ekonomi Islam ialah tidak adanya jurang perbedaan antara warga masyarakat dalam merelisasikan keseimbangan (tawazun), mematikan api kecemburuan, kemarahan sosial dan menghindari faktor-faktor permusuhan serta pembentukan kelas-kelas sosial.<sup>16</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir dan disalurkan atau didistribusikan pada kedelapan alokasi penyaluran yang telah di tentukan.<sup>17</sup>

Hal ini, merupakan upaya Islam dalam melaksanakan kewajiban sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan, menegakkan keadilan, mengembalikan keseimbangan sosial, memberantas kemiskinan, mensosialisasikan jaminan sosial dan *takaful* (kesetiakawanan).<sup>18</sup>

Salah satu bagian (saham) alokasi penyaluran zakat adalah untuk orang-orang “terlilit hutang” (*al gharimin*), yaitu orang-orang yang berhutang untuk diri dan keluarga mereka bukan karena maksiat dan pemborosan.

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam*, Penerjemah: Didin Hafidudin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Robbani Press, 1997) hlm. 437

<sup>17</sup> Qs, *At-Taubah* (9): 60

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Op.Cit, hlm 440

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa diberikan secara konsumtif,<sup>19</sup> yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif guna menambah modal usahanya.<sup>20</sup> Sedangkan pendayagunaan zakat tersebut adalah untuk menyelesaikan program sosial dan membangun ekonomi umat Islam secara operasional dan langsung.

Perhimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelola harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Selain jenis dana, yang terkait dengan penghimpunan adalah cara penerimaan dana. Penentuan cara penerimaan dana akan berpengaruh pada signifikan terhadap efektifitas penghimpunan dana. Penentuan cara penerimaan dana juga akan berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana/alat dan pengendalian yang berbeda.

Ada tiga cara dana diterima : melalui rekening bank, *counter* atau “jemput bola”. Termasuk dalam cara dana diterima adalah pilihan tempat dari masing-masing cara tersebut. Artinya di bank mana membuka rekening, dilokasi mana membuka *counter* atau wilayah mana saja yang akan dilayani dengan “jemput bola”<sup>21</sup>

Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) mempunyai beberapa keuntungan antara lain; menjamin kepastian dan

---

<sup>19</sup> Qs, *Al Baqarah* (2): 273

<sup>20</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm.133

<sup>21</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung : Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 82

disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah dari para *mustahik*, mencapai efisien dan efektifitas, tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat serta untuk syi'ar Islam.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bertujuan;

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Agar pelaksanaan pungutan zakat ini bisa intensif dan efisien maka fungsi zakat adalah sebagai pembina masyarakat sejahtera dalam kehidupan yang adil dan makmur dapat tercapai maka, diperlukan orang-orang yang ahli serta jujur dan mengetahui tentang hukum-hukum zakat, sehingga pendayagunaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

## 2. Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut Sar A. Levitan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Bradley R.Schiller, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm, 126

<sup>23</sup> Hasbi As Shiddieqy, *Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*. (Purwokerto: Pidato Dies yang diucapkan pada Dies Natalis ke- IX I.A.I.N Sunan Kalijaga, 1969) hlm.68

terbatas. Dan menurut Emil Salim, kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok,<sup>24</sup> serta menurut John Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut Sajogya, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan atas kebutuhan pokok yaitu pangan.<sup>25</sup>

Kemiskinan menurut pandangan Islam adalah merupakan problema yang harus diselesaikan, bahkan segera ditanggulangi dan diobati.<sup>26</sup> Sedangkan dalam perspektif hadits, kemiskinan merupakan “penyakit ganas” yang akan berdampak negatif pada kehidupan, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat bahkan kehidupan sosial yang berkaitan dengan aqidah (keimanan), perilaku (moral), pemikiran, peradapan, kebahagiaan rumah tangga.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Malikiyah Syafi’iyah dan Hanabilah miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya. Serta goongan Hanafiyah mendefinisikan miskin adalah yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga).<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996) hlm,1

<sup>25</sup> Adi Prayitno dan Lincoln Arsyat, *Petani Desa dan Kemiskinan* (Yogyakarta: BPFE, 1987) hlm,98

<sup>26</sup> Yusuf Qardhwi, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, penerjemah: Umar Fanany (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996) hlm,49

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.18

<sup>28</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998) hlm.210

Menurut jenisnya kemiskinan dibedakan menjadi dua macam yaitu, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Pengertian kemiskinan relatif adalah berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut adalah dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, pangan, sandang dan papan.<sup>29</sup>

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maupun yang melanda umat Islam adalah kebodohan, fatalisme dan ritualisme. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi apabila masyarakat kaya memberikan perhatian kepada masyarakat lemah, fakir dan miskin dengan menjalankan zakat, infak, shadaqah dan dana-dana lainnya.<sup>30</sup>

Terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat adalah adanya faktor internal, seperti pemalas yang merupakan suatu akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, serta disebabkan karena tertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi sejak dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan.<sup>31</sup>

Masalah kemiskinan sedikitnya ada dua macam perspektif, yaitu perspektif kultural (cultural perspective) dan perspektif struktural atau

---

<sup>29</sup> Bagong Suyanto, *Op. Cit*, hlm,2

<sup>30</sup> Sri Edi Swasono, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: UIP,1987) hlm,24-26

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 212

situasional (situasional perspective). Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis, yaitu individual, keluarga dan masyarakat. Sedangkan perspektif situasional adalah masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern.<sup>32</sup>

Kemiskinan sebagai akibat dampak ketidakmerataan distribusi pembangunan yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun kultural yang ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidakberdayaan bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, gizi, produktivitas, penguasaan modal keterampilan dan teknologi serta hambatan infrastruktur.<sup>33</sup>

Indikator kemiskinan dapat diukur dengan kesehatan, harapan hidup, kemudahan memperoleh pendidikan dan air bersih merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu, bukan hanya keadaan “menderita” (deprivation) akan tetapi suatu keadaan yang lemah (vulnerable). Maka aspek dari kemiskinan, kelemahan menjadi tiga indikator penting, yaitu ketidak pastian fisik, selalu menghadapi krisis dan kemampuan menangani masalah.<sup>34</sup>

Apabila akar kemiskinan berkaitan dengan faktor kultural maka strategi yang disusun adalah dengan meningkatkan etos kerja kelompok miskin, meningkatkan pendidikan dan menata kembali institusi-institusi

---

<sup>32</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003) hlm,127-128

<sup>33</sup> Tjahya Supriyatna. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan* (Jakarta: Rineka Cipta,2000) hlm,21

<sup>34</sup> Brita Mikkelsen, *Metode Penelitian dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Penerjemah: Matheos Nalle (Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2001), hlm, 200



ekonomi. Sedangkan apabila berakar dari masalah struktural maka yang harus dirumuskan kembali adalah pembangunan.<sup>35</sup>

Masyarakat muslim adalah sebuah masyarakat yang saling senasib sepenanggungan dan saling mengasihi. Tidak membiarkan seorang miskin kelaparan sementara ia mampu untuk memberinya makan sebagaimana ia memberikan pakaian, pengobatan dan memenuhi setiap kebutuhannya. Setiap mu'min secara moral agama memiliki dua kewajiban terhadap orang miskin.

Pertama, memberinya makan dan mengurusnya jika ia mampu melakukannya. Kedua, mengajurkan orang lain untuk memberinya makan, kalau tidak maka ia berada dalam ancaman Allah.<sup>36</sup>

### **3. Pemberdayaan Kemiskinan Melalui Zakat**

Pengembangan secara etimologi mempunyai arti pembinaan dan peningkatan kualitas. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas bangsa masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan sesama umat manusia dari negara-negara lain. Fakta ini menuntut adanya upaya-upaya pemberdayaan yang sistematis dan terus menerus untuk melahirkan masyarakat Islam yang berkualitas.<sup>37</sup>

Dalam Pandangan Islam pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti, karena hal ini relevan dengan kebutuhan dan kepentingan umat manusia

---

<sup>35</sup> Sunyoto Usman, *Op Cit.*, hlm, 129

<sup>36</sup> Qs. *Al Maa'uun* (107) :1-3

<sup>37</sup> Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi* (Bandung: Rosda Karya, 2001) hlm. 41

serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Islam merupakan agama gerakan atau perubahan dan juga sebagai agama pemberdayaan.<sup>38</sup>

Dalam pengertian lain pemberdayaan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.<sup>39</sup>

Jadi, jelaslah bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan yang dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. Imang Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik, baik kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.<sup>40</sup>

Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh dengan menitik beratkan pada pemecahan

---

<sup>38</sup> Qs. *Ar Ra'du* (13) :11

<sup>39</sup> Qs. *Al Maa'uun* (107):1-3

<sup>40</sup> Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, *Loc.Cit.*

masalah yang dihadapi masyarakat.<sup>41</sup> Kemudian Sukriyanto berpendapat, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat melepaskan diri dari ketergantungan.<sup>42</sup>

Upaya pengentasan kemiskinan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah kebijaksanaan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi masyarakat miskin.<sup>43</sup> Kelompok masyarakat tersebut akan memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan kemampuannya dalam mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak menekan atau mendesak keposisi ketergantungan.

Maka usaha untuk melepaskan ketergantungan seseorang dan masyarakat dari pihak manapun dalam pengertian pengenalan dan penggalan potensi, merupakan langkah utama menuju masyarakat yang mandiri.

Sarana Islam dalam merealisasikan hal ini ialah dengan mengupayakan peningkatan taraf hidup kaum fakir disamping membatasi ambisi kaum kaya, tidak cukup hanya dengan jaminan hidup bagi kaum papa dan kaum yang membutuhkan, dengan cara memberikan bantuan-bantuan rutin. Akan tetapi, Islam berusaha untuk memodali dan menjadikan mereka kaya dengan penyediaan areal tanah, perdagangan, peralatan pertukangan dan keterampilan.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm,43

<sup>42</sup> Sukriyanto, *"Model-model Pengembangan Masyarakat Islam dalam Era Kekinian"* dalam jurnal populis, No. III (Yogyakarta: BEM-JPMI Fak.Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003) hlm,27

<sup>43</sup> Bagong Suyanto, *Ibid.*, hlm,15

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Op.Cit, hlm,438

Bahwasanya ekonomi Islam tidak cukup hanya menjamin orang yang membutuhkan dengan jalan memberikan kesempatan kerja bagi orang yang menganggur dan membantu orang yang lemah dan fakir, akan tetapi Islam juga menentukan kebutuhan mendadak tunjangan dari *baitul maal* yang bisa membangkitkan mereka.<sup>45</sup>

Sedangkan tujuan utama dalam mengentaskan kemiskinan menurut strategi Bank Dunia terdiri dari tiga bagian, yaitu

1. Membuka kesempatan ekonomi untuk golongan miskin.
  - Membuka kesempatan ekonomi untuk golongan miskin.
  - Meningkatkan produktifitas perusahaan-perusahaan kecil dan para petani kecil.
2. Investasi dalam sumber daya manusia.
  - Memfokuskan pengeluaran pemerintah pada golongan miskin, terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian .
  - Program-program aksi sosial.<sup>46</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui proses sebagai berikut:

1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa zakat secara konsumtif.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm,414

<sup>46</sup> Brita Mikkessen, *Metode Penelitian dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Penerjemah: Matheos Nalle, *Ibid.*, hlm. 23.

2. Pendekatan struktural, bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan baik internal maupun eksternal.

Sedangkan kondisi orang miskin termasuk fakir dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

Pertama, mereka yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor seperti lansia atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial (panti jompo) atas biaya dana zakat secara konsumtif.

Kedua, mereka yang tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi memiliki keterampilan apa pun atau tergolong rendah maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kewiraswastaan atau pendidikan keterampilan lainnya, atau dipekerjakan di unit-unit usaha ekonomi yang dikelola oleh BAZIS sehingga mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat dalam bentuk *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) sampai mereka mampu

mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya dapat berjalan dengan baik.<sup>47</sup>

Upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>48</sup>

Metode distribusi dana zakat kepada yang berhak menerimanya sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi. Cara terbaik untuk memperbaiki keadaan ini adalah dengan membentuk badan-badan zakat nasional & pusat kesejahteraan sosial. Dengan dana zakat dapat digunakan untuk membangun rumah-rumah yang dilengkapi dengan asrama yang kemudian digunakan untuk menampung orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu serta untuk mendidik dan melatih orang buta, tuli dan cacat lain. Rumah sakit bebas biaya harus dibuka dengan bantuan dana zakat untuk merawat orang-orang sakit yang tidak mampu membayar pengobatan dan dokter. Orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan dapat diberikan bantuan keuangan dari dana zakat.

---

<sup>47</sup> Abdurrachman Qadir, *Ibid.* hlm 223-224

<sup>48</sup> Sriharini, *Pondok pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat*, Dalam Jurnal PMI No. I (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003). hlm 45.

Para petani miskin diberi bantuan bibit, pupuk dan peralatan pertanian sesuai ketepatan waktunya.

Selain itu, kegunaan lain dana zakat adalah untuk membekali peralatan teknik dan mesin kepada para seniman, pengrajin dan pekerja-pekerja lainnya yang mampu dan berkeinginan untuk membangun industri milik mereka.<sup>49</sup>

Pungutan zakat diprioritaskan kepada pembelanjaan masyarakat yang ditujukan kepada pengurangan beban si miskin, si sakit, jompo, penganggur dan yatim piatu. Tingkat kehidupan yang layak didasarkan pada fakta bahwa fakir miskin terdiri atas dua tipe:

1. Mereka yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi seperti pengrajin, pedagang kecil dan petani, maka mereka harus diberi dana zakat yang memungkinkan usahanya dapat berjalan dalam bentuk modal usaha.
2. Mereka yang tidak mampu berusaha, seperti orang sakit menahun, buta, jompo, janda, anak kecil, dan sejenisnya. Maka mereka diberi dana zakat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya selama untuk setahun.<sup>50</sup>

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat bagian fakir dan miskin adalah lebih tepat melalui jalur pemberian zakat dalam bentuk produktif. Jadi, dengan apa yang menjadi keahlian mereka dan kebutuhan apa yang mereka perlukan.

Bagi mereka yang mempunyai keahlian di bidang pertanian dapat diberi zakat dalam bentuk benih unggul, alat-alat pertanian yang diperlukan

---

<sup>49</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 3*, penerjemah : Soeryo Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) hlm 331

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat-kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Ibid.*, hlm 128

seperti traktor, bagi mereka yang mempunyai keahlian di bidang jahit menjahit dapat diberi zakat dalam bentuk mesin jahit, bagi mereka yang mempunyai keahlian membuat kue atau roti diberi zakat dalam bentuk modal dan alat yang diperlukan, dan lain- lain.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan misi zakat disamping modal zakat harus dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan ketrampilan fakir dan miskin, dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-hak fakir miskin dalam menguasai dan mengelola lahan mereka, dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan manajemen individu atau kelompok usaha, termasuk koperasi.<sup>52</sup>

#### **4. Keberhasilan Mengentaskan Kemiskinan**

Untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan diperlukan kebijaksanaan atau bahkan gerakan nasional, yang menyangkut kegiatan segala bidang kegiatan masyarakat.

Pembangunan sumberdaya manusia dalam PJP II agar bisa menghasilkan manusia yang kualitasnya lebih tinggi (lebih produktif dan lebih efisien). Maka pembangunan tidak bisa lagi dilihat sebagai pembangunan sumber daya manusia (manusia sebagai satu faktor produksi) tetapi sebagai

---

<sup>51</sup> *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif* (Lampung : IAIN Raden Intan, 1990) hlm, 64

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 104



pembangunan manusia, dimana manusia sebagai subjek dalam pembangunan.<sup>53</sup>

Pada hakekatnya keberhasilan suatu program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya fungsi kesesuaian antara masyarakat penerima program dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana program.<sup>54</sup>

Pendekatan pembangunan manusia atau *human development* dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat merupakan titik pusat dari segenap pembangunan, sekaligus sebagai modal dasar atau kekuatan maupun faktor dominan dan determinan serta sasaran utama pembangunan. Sasaran utama dari peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan manusia dan masyarakat agar mereka mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan mempunyai kemandirian dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktifitas bagi peningkatan hidupnya.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka agar lebih baik. Perencanaan dan implemcentasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi<sup>55</sup>

Dari segi teori, pembangunan ekonomi yang berhasil berarti ada kenaikan besar dalam volume dan nilai produksi barang dan jasa, sehingga konsumsi masyarakat bisa meningkat.

---

<sup>53</sup> Mubyarto, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996) hlm, 80

<sup>54</sup> Tjahya Supriyatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, *Ibid.*, hlm, 165

<sup>55</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, *Ibid.*, hlm, 31

Demikian, trilogi pembangunan yang pada awalnya menempatkan stabilitas nasional pada urutan pertama, kemudian pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan, dan tahap berikutnya pertumbuhan ekonomi paling diutamakan, dan kini pemerataan ditempatkan pada urutan pertama, kemudian pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas nasional.<sup>56</sup>

Keberhasilan yang sebenarnya bagi setiap muslim adalah keberhasilan yang menyangkut cakrawala waktu secara utuh dengan segala aspek kehidupan di dunia ini maupun akherat kelak.<sup>57</sup> Al Quran secara tegas menekankan norma perilaku ini baik untuk hal-hal yang bersifat material maupun spiritual untuk menjamin adanya kehidupan yang berimbang.<sup>58</sup>

Kaidah penting ekonomi Islam untuk mewujudkan kemandirian umat, harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan, sarana dan prasarana yang menjadikan ia mampu memproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik secara materi maupun non materi.<sup>59</sup>

Salah satu aturan Program Pembangunan Wilayah (PPW) adalah dengan melalui pendekatan pembangunan yang secara jelas ingin melaksanakan pemerataan melalui desentralisasi pelaksanaan program-program kemiskinan dan ketidakmerataan antar daerah, yang menunjukkan belum adanya keadilan sosial, itu merupakan salah satu pendorong utama yang dilaksanakan oleh PPW. Dengan demikian, PPW yang berhasil

---

<sup>56</sup> Mubyarto, *Ibid.*, hlm, 76

<sup>57</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Penerjemah: Machun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hlm, 22

<sup>58</sup> QS *AR Ruum* ( 30 ) : 41-44

<sup>59</sup> Yusuf Qardawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, Penerjemah: Setawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1999) hlm, 202

diharapkan mempunyai kesinambungan serta didukung oleh warga masyarakat maka, keharusan untuk mendesentralisasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek sampai ketinggian kabupaten dan kecamatan.

Dalam pelaksanaan PPW ini mempunyai beberapa tujuan yaitu ;

- 1) Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat termiskin di pedesaan.
- 2) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan pedesaan yang mampu menaikkan produktifitas kelompok masyarakat miskin.
- 3) Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan kepada upaya-upaya pembangunan pedesaan oleh pemerintah daerah yang akan menaikkan pendapatan masyarakat miskin di pedesaan.<sup>60</sup>

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pada hakekatnya sangat ditentukan oleh banyak faktor, yaitu keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berpusat pada perilaku manusia itu sendiri yang berorientasi pada birokrasi pemerintah.<sup>61</sup>

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai icon dari pembangunan manusia seutuhnya maka rakyat dijadikan subjek pembangunan. Untuk menjadikan subjek pembangunan perlu adanya strategi pembangunan yang dapat mendorong daya inisiatif dan kreatifitas menuju kemandirian berkarya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Mubyarto, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Ibid., hlm,93-95

<sup>61</sup> Tjahya Supriyatna. Ibid., hlm,171

<sup>62</sup> Mokh. Nazili, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Komunitas (Community Enterprises)* dalam Jurnal PMI No. I, Ibid., hlm. 31

Dalam srategi pembangunan mengutamakan tiga pokok pemerataan yaitu; pertama, upaya harus terarah (*targeted*). Kedua, program harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. Dan ketiga, adalah karena keterbatasannya, yang mengakibatkan masyarakat miskin sulit untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.<sup>63</sup>

Tujuan utama pembangunan desa terpadu adalah meningkatkan produktifitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Sedangkan menurut Weterton, yang melekat dalam pembangunan adalah memperluas tenaga kerja, intensifikasi tenaga kerja skala kecil dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, serta membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multi sektor.<sup>64</sup>

Dukungan penduduk selaku sumberdaya pembangunan ini sangat menentukan sasaran program, yaitu mengenai peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pemantapan kelembagaan usaha bersama melalui masyarakat miskin. Yang bisa menciptakan lapangan kerja adalah pembangunan yang bersifat padat karya yang berkaitan langsung dengan pertanian dan pedesaan.

---

<sup>63</sup> Tjahja Supriyatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Op. Cit.*, hlm, 148

<sup>64</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibid.*, hlm, 45

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soeparjo Adi Kusumo, dkk bahwa kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh meliputi tingkat kesehatan, pengetahuan, ilmu keterampilan, teknologi dan sikap mental dalam pembangunan, terutama dalam mengatasi ketinggalan dengan daerah lainnya.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangat penting karena merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Menurut Moeljarto partisipasi rakyat itu penting karena ;

- a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan.
- b) Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi.
- c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah.
- d) Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek pembangunan.
- e) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif.
- f) Partisipasi adalah cara yang efektif.
- g) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu.<sup>65</sup>

Konsep dasar pengembangan masyarakat adalah pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena telah menjadi mitos pembangunan masyarakat. Pengembangan masyarakat meliputi suatu usaha terencana untuk mengerahkan minat mereka ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang meliputi dampak bagi mereka dan bagi penerapan keputusan tersebut. Dengan demikian pengembangan masyarakat mencoba mempromosikan kekuatan

---

<sup>65</sup> Tjahya Supriyatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Ibid.*, hlm, 210

manusia bukan mengabdikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrat dan masyarakat.<sup>66</sup>

Pendekatan yang dilakukan dengan memberikan rangsangan dan motivasi kepada masyarakat adalah menjadi sasaran difusi untuk memikirkan masalah utama yang dihadapi mereka dan memberikan kesempatan untuk memikirkan dan menemukan cara pemecahan yang terbaik untuk masalah yang mereka hadapi.<sup>67</sup>

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan wilayah juga bermakna demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan , sehingga masyarakat paling bawah akan merasa ikut bertanggungjawab atas hasil-hasil pembangunan. Pengembangan masyarakat adalah sebagai suatu upaya membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya sebagai sistem sosial sehingga secara mandiri mampu mengarahkan dan mempercepat perubahan-perubahan sosial menuju ke situasi yang dicita-citakan.<sup>68</sup>

## F. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Penentuan Objek dan Subjek Penelitian

Upaya RZI DSUQ DIY dalam mengentaskan kemiskinan maka objek penelitian ini difokuskan pada :

- (a) RZI DSUQ DIY dalam mengumpulkan dana umat difokuskan pada arah sumber dana dan kiat-kiat untuk memperoleh dana.

---

<sup>66</sup> Azis Muslim, Konsep Dasar dan Pendekatan Pengembangan Masyarakat, Jurnal PMI No. 1, *Ibid.*, hlm. 39

<sup>67</sup> Sjafrin Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia : Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm, 270

<sup>68</sup> Abdul Rahmad, Andragogi dan Pengembangan Masyarakat, Jurnal PMI No. 1, *Ibid.*, hlm. 55

- (b) RZI DSUQ DIY dalam mendayagunakan dana umat difokuskan pada arah pendayagunaan sumber dana umat dan bentuk-bentuk pendayagunaan.
- (c) Respons masyarakat terhadap RZI DSUQ DIY dalam mengentaskan kemiskinan di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul

Sedangkan subyek penelitian dalam hal ini, adalah Rumah Zakat Indonesia Dompot Sosial Ummul Quro (RZI DSUQ) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Pengurus RZI DSUQ DIY

Hal ini diperlukan karena untuk mengetahui bagaimana upaya RZI DSUQ DIY dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian modal usaha atau dana produktif, guna mengentaskan kemiskinan masyarakat Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul .

- b. Umat Islam yang mendapatkan jasa dari RZI DSUQ DIY

Hal ini diperlukan karena dijadikan sebagai sumber data, mengenai umat yang dibina dan mengetahui bagaimana respons masyarakat terhadap perhatian yang diberikan oleh RZI DSUQ DIY dalam meningkatkan ekonomi umat khususnya di Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul.

- c. Pejabat Pemerintah Desa

Hal ini diperlukan karena untuk mengetahui gambaran umum desa Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode, teknis dan alat untuk melaksanakan studi lapangan yang diperlukan adalah studi dokumenter, pengamatan (observasi), dan wawancara.<sup>69</sup> Maka, dalam penelitian ini, metode yang dipakai sebagai pengumpulan data adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden.<sup>70</sup>

Dalam wawancara ini, bertatap muka secara *face to face* yang digunakan untuk mewawancarai para pelaku dan diinforman yang penting (pengurus atau pengelola RZI DSUQ DIY, dan pejabat pemerintah desa serta umat Islam khususnya yang mendapatkan jasa berupa dana produktif dari RZI DSUQ DIY).

### b. Observasi atau Pengamatan

Secara luas observasi berarti kegiatan untuk melakukan pengukuran, sedangkan secara sempit berarti pengamatan yang tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>71</sup> Dalam observasi ini, peneliti menggunakan

---

<sup>69</sup> Briha Mikkelsen, *Ibid*, hlm. 310

<sup>70</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Rosda Karya, 2000) hlm, 67

<sup>71</sup> *Ibid*., hlm. 69



observasi non partisipan, berarti pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip guna mendapatkan gambaran umum desa Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul dan RZI DSUQ DIY.

3. Analisa Data

Penelitian ini lebih menekankan pada metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (ucapan atau tulisan) dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.<sup>72</sup> Maka analisis data ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh lalu dicoba untuk dipahami kemudian ditafsirkan atau diadakan interpretasi dengan berpedoman pada fokus masalah yang dikaji. Pokok permasalahan yang dikaji adalah tentang pelaksanaan zakat, infak dan sodaqoh oleh RZI DSUQ DIY.

---

<sup>72</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm.,23

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Pengumpulan dana umat pada RZI DSUQ DIY**

Sumber dana umat dan bantuan berasal dari lembaga dan perorangan. Adapun perolehan sumber dana tersebut dengan melalui kolektor, datang langsung, melalui bank serta giro. Sedangkan kiat-kiat untuk memperoleh dana adalah dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui iklan, promosi, membuka cabang dan situs internet, kerjasama antar lembaga, menyelenggarakan presentasi, silaturahmi, sinergi program dan layanan lewat telepon maupun no. rekening.

##### **2. Pendayagunaan dana umat pada RZI DSUQ DIY**

Arah pendayagunaan sumber dana zakat infak dan sodaqoh adalah untuk mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. RZI DSUQ DIY mempunyai peranan sebagai lembaga penyerta modal dan juga sebagai lembaga pendamping serta fasilitator. Adapun pemberdayaan ekonomi umat di sungapan sriharjo imogiri bantul adalah program pemberdayaan kelompok kerajinan rajut DSUQ An Nisa. Sedangkan bentuk-bentuk pendayagunaan sumber dana zakat infak dan sedekah pada RZI DSUQ DIY adalah meliputi dua program yaitu program pemberdayaan yang bersifat konsumtif dan program pemberdayaan yang bersifat produktif.

### 3. Respon masyarakat Sungapan Sriharjo Imogiri Bantul.

Adanya kegiatan program pemberdayaan ekonomi umat di sungapan yaitu program pemberdayaan kerajinan rajut DSUQ An Nisa, masyarakat memberikan respon baik. Respon tersebut datang dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kelompok kerajinan rajut. Program pemberdayaan kerajinan rajut telah membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama masalah pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga serta mendapat kemudahan didalam membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, adanya kegiatan keagamaan telah memberikan pemahaman serta keyakinan di dalam melaksanakan ajaran agama islam.

## **B. SARAN- SARAN**

Untuk mengembangkan RZI DSUQ DIY didalam memenuhi kesejahteraan umat Islam, maka penyusun menyarankan hal - hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menambah kesadaran muzakki perlu adanya pemahaman masyarakat terhadap zakat, bahwa zakat adalah ibadah dan bukti ketundukkan kepada Allah SWT yang memiliki fungsi sosial dalam ekonomi Islam. Maka sosialisasi zakat secara komprehensif harus terus menerus dilakukan agar kesadaran terhadap zakat dapat membuktikan keislamannya, karena Islam tidak hanya mementingkan akhirat saja, akan tetapi kesejahteraan duniapun diperhatikan.
2. Salah satu tujuan zakat dan hikmah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Maka sumber-sumber zakat yang bervariasi ini diharapkan

dapat meningkatkan jumlah penerima zakat. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan memperbanyak fasilitas Lembaga terutama KPK (Kotak Peduli Kemanusiaan).

3. Adanya peningkatan kerjasama antar Lembaga Amil Zakat agar hasil guna dan dayaguna zakat dapat dioptimalkan serta aman, transparansi dan pertanggungjawaban harus terus menerus ditingkatkan sehingga masyarakat semakin percaya membayar zakat melalui Lembaga.
4. Untuk pembinaan rohani ibu-ibu pengrajin selain pengajian, maka perlu adanya TPA bagi ibu-ibu agar dapat membaca Al Quran dengan baik dan benar.

### **C. PENUTUP**

Penulis ucapkan Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penulisan ini masih belum sempurna, karena keterbatasan penulis, baik itu mengenai penulisan, bahasa, dan analisa data yang tidak dipahami. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala masukan dan kritikan membangun dari segenap pembaca demi untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah S.W.T penulis berserah diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3, Penerjemah Soeroyo Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, penerjemah: Dwi Nurjulianti, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995).
- Al Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Al Islam, Jilid 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- \_\_\_\_\_, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: Pidato Dies Yang Diucapkan Pada Dies Natalis Ke- IX IAIN Sunan Kalijaga, 1969)
- Furchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998)
- Kahf, Monzer, *ekonomi Islam : telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*, penerjemah Machmun Husein (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1995)
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi* (Bandung: Rosda Karya 2001)
- Mansur, Tolchah, *Ilmu Fiqih I* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Islam, 1998)
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian dan Upaya Pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi praktisi lapangan*, penerjemah: Matheos Nalle (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Mubyarto, *Ekonomi kerakyatan dan program IDT* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996)
- Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)

\_\_\_\_\_, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996)

Muslim, Azis, dkk. *Konsep Dasar dan Pendekatan Pengembangan Masyarakat*, Jurnal PMI No. 1. (Yogyakarta : Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

Pengelolaan Zakat Mal Bagian Miskin suatu Pendekatan Operatif (Lampung : IAIN Raden Intan, 1990)

Prayitno, Hadi dan Lincoln, Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan* (Yogyakarta: BPFE, 1987)

Qardawi, Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, penerjemah : Umar Fanany (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996)

Qodir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

\_\_\_\_\_, *Anatomi Masyarakat Islam*, Penerjemah : Setiawan Budi Utomo, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1999)

\_\_\_\_\_, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah : Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunur Rofiq Shalehrahmid, (Jakarta: Rabbani Press, 1997)

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)

Sairin, Sjahfri, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Sulisaningsih, *Dinamika Kelompok Keagamaan sebagai Pendorong Usaha Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga*, dalam Jurnal Penelitian Agama, No. 17, (Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

Supriyatna, Tjahya, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Suryodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi dan Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996)

Swasono, Sri Edi, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta : UIP, 1987)

Sukriyanto, *Model-model Pengembangan Masyarakat dalam Era Kemiskinan*, Jurnal Populis No. 1, (Yogyakarta: BEM JPMI Fak. Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. (Jakarta: Direktorat Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 1999)

Usman, Sunyonto, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung : Asy Syamil Press dan Grafika, 2001)

Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997)